

Telaah Bahasa dalam Sistem Kekuasaan Negara

Oleh Dadang S. Anshori

Untuk memperkuat kekuasaan, rejim Orde Baru memeralat bahasa Indonesia sehingga mengalami gejala “kematian bahasa”. Akibatnya, daya nalar untuk berpikir sistematis lemah dan kreativitas amat kurang. Orde Baru menciptakan dan menggunakan kosakata terdiri atas berbagai simbol politik untuk menekan dan membatasi kebebasan menyatakan pikiran dan perasaan secara kritis, yang masih berlangsung sampai sekarang. (D.P. Tampubolon, 1998)

A. Pengantar

Bahasa Indonesia memiliki dua keistimewaan, pertama sejak 1928 bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa nasional. Konsekuensi dari kenyataan ini berarti bahwa bahasa Indonesia memiliki dampak politik. Bahasa Indonesia menjadi alat persatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ras, agama, dan suku bangsa. Kedua, bahasa Indonesia sejak 18 Agustus 1945 menjadi bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam bahasa lain telah menjadi bahasa “administrasi negara”. Dilihat dari dua sisi ini bahasa Indonesia memiliki nilai strategis.

Bahasa dalam setiap rezim kekuasaan memiliki warna yang berbeda. Bahasa Indonesia ragam politik dan birokrasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ragam bahasa sosiolek lainnya. Sejarah ejaan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa setiap rezim kekuasaan memiliki kepentingan terhadap keberperanan bahasa selaras dengan kecenderungan kekuasaan saat ini. Bahkan bahasa dalam beberapa hal dipolitisasi baik makna (semantis) maupun bentuk (sintaks) agar secara sinergis mendukung berlangsungnya kekuasaan.

Hooker (1996:72) melakukan penelitian secara intensif terhadap teks pidato Hari Kemerdekaan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Teori yang dikembangkan adalah memungkinkan diketahui interaksi antara teks dan konteks, yang meliputi tiga konsep dasar, yaitu wilayah wacana (*field of discourse*), penyampaian wacana (*tenor of discourse*), dan mode wacana (*mode of discourse*). Hasil penelitian Hooker tersebut sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini.

Aspek	Orde Lama	Orde Baru
Bidang/Wilayah	Komentar dan apologi Rumusan umum Bisa ditawarkan Waktu: - Jauh dari masa lalu - Masa lalu	Tinjauan dan rencana mendatang Rumusan detail Tak bisa ditawarkan Waktu: -Sekarang -Mendatang
Tenor	Dialog Kerangka rujukan pembicara: kita, saya, Bung Karno, Presiden Soekarno	Monolog Kerangka rujukan pembicara: kita, pada umumnya saya
Cara	Pribadi, emosional, perpaduan, formal dan informal, empati, eksistensi, acak	Impersonal, bahasa sederhana, formal, berwibawa, terencana, terarah, berulang-ulang

Berkaitan dengan kompleksnya persoalan bahasa dalam konteks birokrasi negara, muncullah sebuah filsafat yang menganalisis bahasa sebagai objek penelitiannya. Tokoh filsafat ini, Ludwig Wittgenstein, memunculkan istilah “permainan bahasa” (*language game*). Menurutnya, banyak permainan bahasa sesuai dengan konteks kepentingan politiknya.

Adanya permainan bahasa ini diperkuat oleh novelis, George Orwell, dalam bukunya, *Nineteen Eighty Four*. Ungkapannya yang terkenal adalah “Jika pikiran mengkorupsi bahasa, maka bahasa dapat pula mengkorupsi pikiran (Lewuk, 1995:178).

B. Bahasa dalam Kekuasaan Orba

Intervensi yang paling nyata dari rezim kekuasaan Orde Baru terhadap bahasa adalah “pemiskinan makna” (meminjam istilah Mukhtar Lubis) dalam bahasa-bahasa yang sentralistik. Istilah terakhir ini tidak hanya dipakai pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi, politik dan kekuasaan. Makna bahasa diikat dalam suatu kepentingan politik penguasa dan diberikan secara mentah-mentah kepada masyarakat untuk dipakainya. Otoritas makna dan dominasi publik membuat bahasa-bahasa politik menjadi bermakna tunggal. Ketika banyak kerusuhan dan penentangan terhadap kesewenang-wenangan, penguasa membuat kosakata ‘provokator’ dan “aktor intelektual” yang memiliki makna secara teknis sama dengan pelaku makar. Orang-orang yang dituduh sebagai provokator diposisikan sebagai musuh negara dan harus dimusuhi masyarakat banyak. Paling tidak, rezim Orde Baru telah membentuk warna berpikir yang seragam dalam bentuk dan polanya karena senantiasa dikontrol oleh kekuasaan. Manusia yang hidup selama 32 tahun di bawah zaman Orba, menurut Jalaluddin Rakhmat (1999:142) memiliki karakteristik yang khas dan terbiasa untuk berpikir “berkelok-kelok” karena di satu sisi ingin disebut kritis oleh publik, namun di sisi lain tidak hendak “berhadapan” atau melakukan politik akomodasi dengan penguasa Orde Baru

supaya tetap *survive* atau istilah psikologinya *ego defense mechanism* (mekanisme pertahanan ego). Sosok manusia Orba ini oleh Jalaluddin Rakhmat disebut dengan nama “Homo Orbaicus”. Terjadinya model manusia “Orbaicus” ini terjadi karena terlalu lamanya kontrol berpikir lewat penataran P4 sejak SD, SLTP, SMU, hingga PT. Hal semacam ini pernah juga terjadi orang-orang komunis dikendalikan oleh pemerintahnya.

Otoritas bahasa sebagai konsensus sosial yang berstruktur dan berlogika sehingga menghasilkan makna yang “baik dan benar” telah hilang. Otoritas bahasa oleh penguasa terjadi pada struktur birokrasi dalam melaporkan peristiwa di daerahnya. Di saat banyak warga masyarakat mengalami krisis pangan, seorang bupati memberikan laporan bahwa padi di daerahnya mengalami surplus. Pejabat di atasnya menerima laporan dan melanjutkan ke tingkat yang lebih atas. Terjadilah manipulasi data yang dimaklumi dan dianggap benar sehingga di saat Indonesia dilanda kelaparan laporan Menpen hanya menyebutkan pangan masih tersedia cukup memadai. Belum lama ini kita nyaris terbiasa untuk melihat kebohongan yang dilakukan oleh pejabat dan kita membiarkan karena bahasa mereka lebih kuat daripada bahasa rakyat.

Akibatnya ternyata cukup hebat, masyarakat memaklumi dan menyukai bahasa-bahasa simbolis dan populistis. Di jaman Orde Baru kita mengenal semua program pembangunan dengan label “gerakan”. Dari sana lahirlah “Bapak Pembangunan” atau sebutan sejenis. Setiap ada pejabat yang “bermanis bibir” dibuatlah kosakata untuk menyanjung pejabat itu dengan berbagai julukan. Maka tidak aneh kalau pejabat yang seharusnya menjadi abdi rakyat, menjadi terbalik: rakyat abdi pejabat. Setiap pejabat yang turun

ke daerah selalu dijuluki pejabat yang memperhatikan rakyatnya, padahal mereka hendak menguras kekayaan daerah tersebut. Rasanya seluruh kenyataan ini tidak bisa dipisahkan dari aspek bahasa, karena posisi bahasa yang subelementer. Kalau demikian adanya, jadilah yang disebut “language game” dalam istilah Wittgenstein. Bahasa “diobok-obok” untuk menyembunyikan pikiran bukan untuk menyatakan pikiran. Bahasa digunakan untuk menyembunyikan fakta, bukan menyebutkan dan menjelaskan kenyataan. Mari kita bandingkan antara “bahasa kampanye” yang digunakan oleh para politisi partai politik dalam bentuk janji-janji indah dengan kenyataan setelah mereka menjadi anggota legislatif: paradoksal.

C. Bahasa di Era Reformasi

Era reformasi dimulai dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru setelah berkuasa hampir 32 tahun. Presiden Soeharto, simbol utama kekuasaan Orde Baru menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, BJ. Habibie pada 21 Mei 1997. Peristiwa ini sekaligus membuka babak baru kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai dimensi, termasuk di dalamnya muncul keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia.

Masa pemerintahan BJ Habibie pun tidak berjalan lama, hanya 522 hari. Namun demikian, dalam masa waktu yang singkat tersebut, beberapa kebijakan dikeluarkan. Beberapa di antara yang paling mencolok adalah dikeluarkannya Undang-undang sistem politik yang memungkinkan Indonesia memiliki partai politik yang banyak. Ternyata, hampir 104 partai mendaftar untuk mengikuti Pemilu 1999, namun hanya 48 yang dinyatakan layak

mengikuti Pemilu oleh Tim 11 yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid. Kemudian kebijakan yang nyata selain UU Sistem Politik adalah kebebasan pers yang ditandai dengan menjamurnya pers. Presiden BJ. Habibie melalui Menpen HM. Yunus Yosfiah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk menerbitkan sebuah koran atau majalah tidak diperlukan lagi SIUUP. Hal ini kemajuan yang besar dalam kebebasan pers.

Demikian pula, pola kepemimpinan sangat kontradiksi dengan kepemimpinan sebelumnya. BJ. Habibie memuka babak baru komunikasi yang terbuka. BJ. Habibie terbukti telah mengembangkan pola baru dalam komunikasi birokrasi yang cerdas, kritis, terbuka dan intelek. Habibie bukan hanya sanggup mengkritik dengan kecerdasannya, namun juga telah sangat terbuka dan siap dikritik dalam banyak sisi kehidupan bernegara. Dalam banyak kesempatan komunikasi, BJ. Habibie telah menghidupkan budaya bahasa yang tidak berambigu dan memungkinkan orang lain berpikir dalam kerangka bahasa yang dipakainya.

Sikap terbuka ini memunculkan konsekuensi logis pada penggunaan bahasa komunikasi yang berlainan dari pemerintahan sebelumnya. Hipotesis terhadap penggunaan bahasa pada era reformasi, terutama pada saat pemerintahan BJ Habibie adalah sebagai berikut.

Pertama, keterbukaan berkomunikasi menyebabkan sekat-sekat formal dan serba tekstual berubah menjadi situasi akomodatif bahkan informal dan tanpa teks. Dengan demikian, komunikasi birokrasi terlihat sangat alamiah. Situasi alamiah memungkinkan komunikan dan komunikator tidak bersifat “neko-neko” tetapi berargumentasi dalam kadar bahasa yang sesungguhnya.

Di sini berlalu apa yang disebutkan George Orwell sebagai “bahasa yang membunyikan pikiran, bukan bahasa yang menyembunyikan pikiran”.

Kedua, munculnya sikap kritis dan penggunaan bahasa yang transaran. Andaikata di masa pemerintahan Orde Baru, penggunaan bahasa birokrasi berbau eufimisme dan pleonasme, maka di masa pemerintahan BJ. Habibie bahasa yang dipergunakan sangat terbuka dan tidak ambigu. Oleh karena itu pemikiran yang kritis dengan terbuka pula bisa disampaikan. Istilah-istilah “kesalahan prosedur” sudah berganti menjadi “korupsi”.

Progresifitas penggunaan bahasa Indonesia yang terbuka terlihat dalam penggunaan media massa. Bahkan dalam beberapa media massa, bahasa yang dipergunakan cenderung provokatif dan tidak lagi mengenal etik bahasa sebagai media komunikasi. Bahasa telah dijadikan alat untuk menyudutkan dan menjatuhkan pihak lain yang dipandang media massa tersebut berseberangan dengan kepentingan media massa tersebut.

Kajian mengenai bahasa di era reformasi ini menjadi sangat berarti apabila secara objektif memasukkan bahasa tertulis yang disampaikan tokoh-tokoh penting di media massa. Bahasa media massa diyakini semakin jauh dari kecenderungan berbahasa Indonesia yang baku. Hal ini lebih disebabkan percepatan informasi yang memungkinkan bahasa Indonesia baku ditinggalkan dalam penggunaannya. Selanjutnya kecenderungan bahasa untuk menggunakan bahasa yang diminiati (provokasi) mengharuskan redaktur memilih bahasa yang pleonatis. Semua ini tidak terlepas dari kecenderungan para elite birokrat dalam menggunakan bahasa.

D. Meluruskan Posisi Bahasa

Di saat hampir semua elemen bangsa ini menyuarakan kepentingannya dalam rangka reformasi bangsa, bahkan UUD'45 pun diamandemen, kita saksikan insan-insan bahasa masih bersikukuh dengan rumusan bahasa yang baik dan benar versi P3B. Padahal penguasa yang melegalkan berdirinya P3B banyak merusak tatanan bahasa. Bahasa tak bergeming dengan hiruk-pikuknya perubahan. Dia seakan sudah sangat kokoh menapaki struktur birokrasi politik. Dia juga tidak lagi memberi alternatif selain kebenaran tunggal yang dimilikinya. Ada baiknya kita melakukan kilas balik pada Kongres Bahasa Indonesia ke-6, 1993. Pada kongres tersebut disepakati agar dibentuk Undang-Undang Kebahasaan Indonesia (UUKI). Demikian pula agar P3B menjadi lembaga non-departemen rangka mengeliminir intervensi kekuasaan terhadap independensi (kemandirian)

bahasa. Kedua ide itu sedikit banyak akan mendongkrak posisi kekuatan (*power position*) bahasa dalam struktur birokrasi politik.

Politik bahasa berkait erat dengan tiga hal pokok: kode bahasa (*corpus*) status bahasa (*status*) serta penguasaan bahasa (*equasition*) yang dijawantahkan dalam pendidikan bahasa (*learning of language*). Ketiga aktivitas politik bahasa ini memang harus lepas dari intervensi kekuasaan, baik secara ide maupun secara praktis. Politik bahasa harus melihat fenomena penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan konsensus sosial, sehingga bahasa tak lepas dari ikatan-ikatan sosial. Ketiga aspek di atas kalau kita kaji secara mendalam berada dalam posisi yang rentan. Kode bahasa dihadapkan pada persoalan-persoalan bahasa praktis yang tak terjawab karena pesatnya informasi dan kompleksnya dinamika sosial, misalnya terbatasnya kosakata kamus dan menjamurnya istilah-istilah asing yang secara *corpus* harus segera disikapi. Status bahasa menghadapi kenyataan kuantitas dan kualitas pengguna bahasa. Mengingat fungsi, peran, dan kedudukan bahasa Indonesia, sikap kompetitif harus sudah dimiliki “orang-orang bahasa” sebab status bahasa lebih dekat dengan prestisus seseorang dalam berbahasa. Dalam hal ini bahasa Inggris memiliki prestisi sosial yang tinggi, meskipun ada pepatah dengan bahasa Inggris kita menjelajahi dunia dan dengan bahasa Indonesia kita menapaki bumi. Sementara pendidikan bahasa kita sulit diukur keberhasilannya karena kognisi bahasa lebih mendominasi sehingga siswa (mahasiswa) belajar tentang bahasa bukan bagaimana menggunakan bahasa. Keterampilan-keterampilan berbahasa terputus dalam rangkaian teori. Hal terakhir ini lebih rumit lagi sebab mengikutsertakan banyak komponen.

Rekonstruksi atas bahasa—bukan sekadar P3B—didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, fenomena menunjukkan bahwa “bahasa Indonesia yang baik dan benar” cenderung elitis dan dipahami secara sempit. Pengertian selama ini menunjukkan bahwa bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang diproduksi oleh P3B. Ototentrisitas bahasa bukan mustahil hanya melahirkan kebenaran bahasa dalam makna yang tunggal. Seberapa besar “kekuasaan” bahasa untuk mengatur penggunaan bahasa di kalangan elit politik, sehingga mereka tidak membuat kebingungan sosial melalui bahasa yang dipakainya? Bahasa Indonesia yang resmi hampir tidak pernah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam kegiatan pembelajaran. Bahasa Indonesia “yang baik dan benar” hanya ada dalam buku-buku teks bahasa atau tatabahasa baku bahasa Indonesia yang berbeda dari bahasa sehari-hari.

Kedua, dengan demikian, bahasa “resmi” tidak pernah berinteraksi dengan bahasa “alamiah”. Bagaimanapun bahasa tidak terlepas dari konteks sosial dimana, kapan, dan oleh siapa bahasa tersebut dipakai. Terpisahnya bahasa yang “bahasa baku” dari lingkungan masyarakat bahasa, menunjukkan indikasi bahwa bahasa hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*language for sains*) yang dimiliki oleh sebuah lapisan masyarakat elit Indonesia alias bahasa untuk bahasa (*language for language*). Bahasa harus mampu merekonstruksi sosial, bukan sebaliknya. Menurut Ignas Kleden, kekeliruan berpikir manusia disebabkan kekacauan dalam berbahasa dan apabila manusia berpikir dengan kekacauan, dia akan merusak bahasa. Dalam posisi ini bahasa tidak bisa didekati dari teori bahasa saja. Bahasa harus juga didekati sebagaimana fenomena sosial lainnya, yakni

aspek kekuasaan dan kepentingan terhadap bahasa. Dalam konteks sains, bahasa tidak terbebas dari nilai-nilai yang ada di sekitarnya.

Ketiga, perlu dilakukan upaya “mendekatkan” bahasa baku dengan bahasa realitas dalam masyarakat. Sebuah sistem nilai tak akan mampu mengontrol elemen di dalamnya, apabila dia tidak pernah beririsan dengan elemen-elemen tersebut. Dinamika sosial terjadi, manakala sistem nilai dalam masyarakat satu sama lain saling bersaing untuk menjadi sistem nilai pemeluknya. Kita tidak hendak menjadikan bahasa sebagai proyek politik elit bahasa yang tidak pernah tertransformasi dalam masyarakat bahasa. Oleh karena itu, semua fenomena kebahasaan dalam masyarakat harus ditangkap sebagai sumber (*source*) bagi perkembangan bahasa dan kecenderungan “kehidupan” bahasa di masa mendatang. Di sini memang muncul satu pertanyaan, mungkinkah kehidupan bahasa ditentukan oleh “pasar” masyarakat bahasa? Di sini pulalah kita perlu mendefinisikan berbagai istilah: bahasa ilmu, bahasa sosial, bahasa baku dll. sesuai dengan sosiolinguistik agar kita fleksibel dalam mendefinisikan hakikat bahasa dan tidak memberi makna tunggal terhadap bahasa.

Keempat, “mendekatkan” bahasa “politik” (bahasa baku) dengan bahasa realitas harus disosialisasikan melalui institusi formal. Pendidikan bahasa di sekolah hingga perguruan tinggi hendaknya dimulai dengan apresiasi bahasa alamiah yang ada di masyarakat, bukan menjejali dengan konsep-konsep bahasa “politik” sehingga para pembelajar memiliki toleransi yang tinggi terhadap realitas bahasa. Pembelajaran bahasa tidak lagi bisa dilakukan dengan “doktrin-doktrin” sebagaimana kita mengajarkan nilai-nilai Pancasila melalui penataran P4. Dengan bahasa lain, kita bisa memulai

dengan sikap mengakui kebenaran bahasa di luar bahasa-bahasa teks yang disusun oleh para elit bahasawan.

Daftar Pustaka

Alwasihal, A. Chaedar. 1996. "Rekayasa Bahasa dan Perubahan Sosial Bahasa". Makalah Diskusi FPBS UPI.

Anshori, Dadang S. 2000. "Menggagas Masyarakat Melek Baca" dalam *Menggagas Pendidikan Rakyat* (Dadang S. Anshori, ed.) Bandung: Alqaprint dan Ford Foundation.

Badudu, Yus. 1996. "Bahasa Indonesia Setelah Berusia 68 Tahun". Artikel *Kompas*, 27 Oktober 1996.

Kleden, Ignas. 1978. "Eufimisme Bahasa, Konsensus Sosial, dan Kreativitas Kata". dalam *Prisma*, Desember 1978. hal. 67-72.

Latif, Yudi dan Idi Subandi Ibrahim (Ed). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan

Lewuk, Peter. 1995. *Kritik Filosofis atas Pembangunan, Beberapa Serpihan pemikiran*. Jakarta: Fosko'66

Rakhmat, Jalaluddin, 1999. *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi*. Bandung: Remaja Rosdakarya